

**EVALUASI PENERAPAN AKUNTANSI UNTUK BELANJA
MODAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NO.71 TAHUN 2010 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT
STABAT**

SKRIPSI

Oleh :

**AYU ALFIKA NINGRUM
NPM : 12 833 0074**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

**M E D A N
2 0 1 6**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)22/2/24

Judul Skripsi : Evaluasi Penerapan Akuntansi Untuk Belanja Modal Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat Stabat

Nama Mahasiswa : AYU ALFIKA NINGRUM

No. Stambuk : 12 833 0074

Program : Akuntansi

Menyetujui :
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



(Hj. Retnawati Siregar, M.Si)

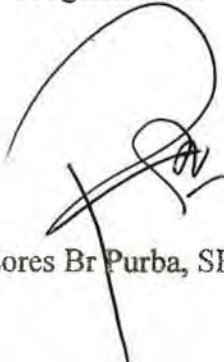
Pembimbing II



(Drs. Halomoan Situmorang, Ak.,MMA)

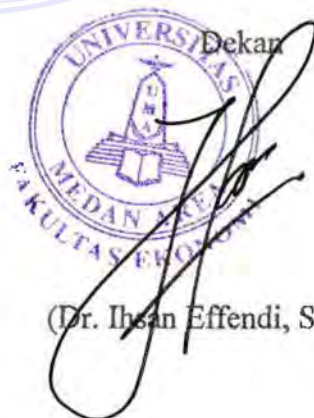
Mengetahui :

Program Studi



(Linda Lores Br Purba, SE.,M.Si)

Dekan



(Dr. Ihsan Effendi, SE.,M.Si)

UNIVERSITAS MEDAN AREA Tanggal Lulus :

2016

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)22/2/24

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi penerapan akuntansi untuk belanja modal berdasarkan peraturan pemerintha no 71. Tahun 2010 pada dinas pekerjaan umum kabupaten langkat. Penelitian ini dilakukan pada dinas pekerjaan umum kabupaten langkat apakah akuntansi untuk belanja modal pada dinas pekerjaan umum kabupaten langkat sudah sesuai dengan peraturan pemerintah no.71 tahun 2010. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif, populasi dalam penelitian ini yaitu apakah akuntansi untuk belanja modal pada dinas pekerjaan umum kabupaten langkat sudah sesuai dengan peraturan pemerintah no.71 tahun 2010. Jenis data dalam penelitian data kualitatif. Data yang di peroleh dari dinas pekerjaan umum kabupaten langkat seperti: struktur organisasi, sejarah singkat perusahaan, visi dan misi, daftar laporan keuangan di dinas pekerjaan umum kabupaten langkat. Hasil dari penelitian penelitian yaitu anggaran belanja modal dinas pekerjaan umum kabupaten langkat sudah sesuai dengan peraturan peraturan pemerintah no.71 tahun 2010.

Kata kunci : Akuntansi Daerah,Belanja Daerah,Belanja Modal.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Evaluasi Penerapan Akuntansi Untuk Belanja Modal Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat”. Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas Medan Area.

Adapun dalam penyusunan skripsi ini telah banyak mendapat bimbingan, dukungan serta bantuan dari berbagai pihak sehingga terselesaikannya skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis dengan tulus hati mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada :

1. Bapak Prof Dr. H.A. Ya’kub Matondang, MA. selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Drs. Ihsan Effendi SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area
3. Ibu Linda Lores, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area
4. Ibu Hj. Retnawati Siregar, SE, M.Si selaku Dosen pembimbing I, yang telah meluangkan waktunya guna memimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi

ini.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/2/24

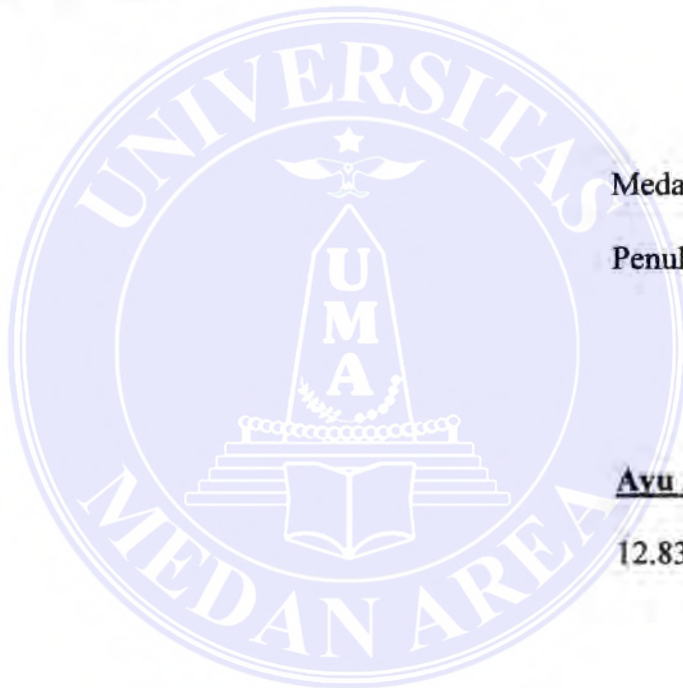
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)22/2/24

5. Bapak Drs. Halomoan Sittumorang, Ak MMA selaku Dosen pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya guna memimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Harry Pardamenta, SE, M.Si Sekretaris, yang telah meluangkan waktunya guna memimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teristimewa kepada orang tua penulis Mama Tri Teti Herawatidan Papa Suroto yang telah memberikan cinta dan kasih sayang yang tulus dengan mengasuh, membesarkan, dan memberikan dukungan moril maupun material serta doa yang tiada tara. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini seperti harapan selama ini. Terima kasih juga kepada adik Ridho Utomo dan abangnda Erzad Subandi yang telah memberikan semangat dalam menyusun skripsi ini.
8. Pimpinan, Staf, dan Pegawai, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat Stabat terima kasih atas bantuan dan waktu yang diberikan selama penelitian.
9. Spesial buat Sahabat-sahabat: Susi Wulandari, Eka Ayu Ramadhani, Kurnia Aurianti, Reviwya Gesti paningrum, Ulfa Khairani daulai, Junistya pralisa, Tissi bunga ananda, Putri Desyka, Zella Pratiwi, Dian Permata Sari dan seluruh teman-teman seperjuangan khususnya Akuntansi Keuangan yang telah memberikan bantuan, dukungan, kritik, dan saran yang membangun sehingga penulis menjadi lebih dewasa. Mudah-mudahan persahabatan kita tetap abadi selamanya. Sertaseluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas semangat dan dukungannya selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana yang dituntut dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh mahasiswa/I di Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area, bagi masyarakat luas, agama, bangsa, dan Negara.



Medan, Mei 2016

Penulis

Ayu Alfika Ningrum

12.833.0074

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Akuntansi	5
1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik	5
2. Tujuan Akuntansi Sektor Publik	5
3. Penganggaran Sektor Publik	6
4. Akuntansi Keuangan Daerah dan Akuntansi Pemerintah.....	9
5. Akuntansi Transaksi Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah	11

1. Pengertian Belanja Modal	14
2. Jenis – jenis Belanja Modal.....	15
3. Kriteria Belanja Modal.....	16
4. Tahap Belanja Modal	17
C. Penelitian Terdahulu	18
D. Kerangka Konseptual	19

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	20
B. Populasi dan Sampel	21
C. Definisi Operasional Variabel	22
D. Jenis dan Sumber Data	23
E. Teknik Pengumpulan Data	23
F. Teknik Analisis Data.....	24

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	25
B. Pembahasan.....	41

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan kapabilitas dan efektifitas dalam menjalankan roda pemerintahan, namun pada kenyataannya pemerintah daerah umumnya belum menjalankan fungsi dan peranan secara efisien terutama dalam pengelolaan keuangan daerah. Kondisi ini muncul karena pendekatan umum yang digunakan dalam penentuan besar alokasi dana untuk setiap kegiatan adalah pendekatan inkremental, yang didasarkan pada perubahan satu atau lebih variabel yang bersifat umum seperti tingkat inflasi dan jumlah penduduk.

Selain itu, pendekatan lain yang digunakan adalah line item budget yaitu perencanaan anggaran yang didasarkan atas pos anggaran yang telah ada sebelumnya. Pendekatan ini tidak memungkinkan pemerintah daerah untuk menghilangkan satu atau lebih pos pengeluaran yang telah ada, meskipun pos pengeluaran tersebut sebenarnya secara riil tidak dibutuhkan oleh unit kerja yang bersangkutan. Sementara itu analisis mendalam mengenai struktur, komponen dan tingkat biaya dari setiap kegiatan belum pernah dilakukan.

Prosedur akuntansi pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) meliputi serangkaian proses dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai pada pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi

komputer yang memiliki kewajiban melakukan pencatatan transaksi transaksi yang terjadi di dalam lingkungan satuan. Dalam struktur pemerintahan daerah

satuan kerja perangkat daerah merupakan entitas akuntansi kerja, dalam intruksi keuangan daerah terdapat dua jenis satuan kerja perangkat daerah yaitu:

- 1) Satuan kerja perangkat daerah (SKPD)
- 2) Satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) prosedur akuntansi pada SKPD meliputi serangkaian proses pencatatan atas pendapatan, belanja asset dan selain asset dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan belanja merupakan instrument penting untuk menunjang terlaksananya program dan kegiatan. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari kas umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Akuntansi untuk belanja modal berorientasi pada masa depan yaitu memprediksi keadaan yang akan dialami oleh Dinas Pekerjaan Umum. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat juga mempunyai data keuangan yang kompleks sehingga perlu dilakukan pencatatan perencanaan anggaran untuk belanja modal pada Dinas Pekerjaan Umum. Agar tidak terlalu luas pembahasan yang dilakukan dalam penelitian, maka penulis menggunakan laporan posisi keuangan dari Dinas Pekerjaan Umum.

Dinas Pekerjaan Umum merupakan salah satu kantor yang bergerak di bidang jasa pemborongan proyek dan konsultasi bidang cipta karya atau bidang pengairan. Untuk tetap menjaga kelangsungan hidup perusahaan, maka Dinas

Pekerjaan Umum perlu melakukan analisa laporan keuangan sebagai salah satu
UNIVERSITAS MEDAN AREA

evaluasi untuk belanja modal.

Document Accepted 22/2/24

© Hak Cipta Ditugaskan oleh Universitas Medan Area

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)22/2/24

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Penerapan Akuntansi untuk belanja Modal berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat mengenai Standart Akuntansi Pemerintahan.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Apakah akuntansi untuk belanja modal di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010?”**.

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui dan menilai **“Apakah Akuntansi Untuk Belanja Modal di Dinas Pekerjaan Umum sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010”**?.

D. Manfaat Penelitian

Selain Tujuan, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat manfaat yang diperoleh bagi penulis adalah :

1. Bagi penulis

Penulis diharapkan mampu mengumpulkan, mengolah dan menganalisa

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

data secara sistematis sesuai masalah yang diangkat dalam penulisan

Document Accepted 22/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)22/2/24

tugas akhir ini. Selain itu Penulis dapat mengetahui tentang cara penerepan akuntansi yang baik dan benar untuk belanja modal berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat tentang tata cara pembuatan perhitungan dan laporan keuangan dengan penerapan akuntansi yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, yang selama ini mereka lakukan.

3. Akademis

Penelitian yang dilakukan oleh penuliis ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk melakukan penelitian dimasa yang akan datang khususnya penelitian mengenai Evaluasi Penerapan Akuntansi Untuk Belanja Modal Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71Tahun 2010 mengenai Standart Akuntansi Pemerintahan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akuntansi

1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Menurut Abdul Halim dan Syam Kusyufi (2009:11) Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga lembaga tinggi Negara dan departemen departemen dibawahnya, pemerintahan daerah, BUMN, BUMD, LSM pada sektor dan yayasan sosial. maupun pada proyek proyek kerjasama pada sektor publik dan swasta”.

Menurut Amin widjaja Tunggal (2010:11) Akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan pengikhtisaran, penganalisaan dan pelaporan transaksi keuangan suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan.

2. Tujuan Akuntansi Sektor Publik

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat efisien dan ekonomis suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (*Manajemen control*) .
2. Memberikan informasi yang memungkinkan para menejer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya.

Dan memungkinkan bagi pegawai pemerintahan untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik tujuan ini berkaitan dengan akuntabilitas (*accountability*).

3. Penganggaran Sektor Publik

Menurut Indra Bastian (2005:163), Perencanaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses manajemen organisasi. Demikian juga, anggaran mempunyai posisi sangat penting. Anggaran mengungkapkan apa yang akan dilakukan di masa mendatang. Pemikiran strategis di setiap organisasi adalah proses di mana manajemen berpikir tentang pengintegrasian aktivitas kearah tujuan organisasi. Semakin bergejolak lingkungan pasar, teknologi, dan ekonomi eksternal, manajemen akan didorong untuk menyusun strategi. Pemikiran strategis manajemen didokumentasikan dalam berbagai dokumen perencanaan. Keseluruhan proses diintegrasikan dalam prosedur penganggaran organisasi.

Menurut Mashun (2006:26) Organisasi adalah sekelompok orang yang berkerja sama secara terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu atau sejumlah sasaran yang telah ditetapkan bersama. Setiap organisasi mempunyai tujuan spesifik yang hendak dicapai dan memerlukan manajemen yang baik agar bisa mencapai tujuan tersebut, tujuan tersebut dapat bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dapat dibagi menjadi tujuan yang bersifat financial maupun nonfinancial.

Tujuan dari setiap organisasi sangat bervariasi tergantung pada tipe organisasi pada dasarnya terdapat 4 tipe organisasi :

1. *Pure profit organization*

Pure profit organization adalah organisasi yang bertujuan untuk menyediakan atau menjual barang dan jasa dengan tujuan utama untuk memperoleh laba sebanyak banyaknya sehingga bisa dinikmati oleh para pemilik.

2. *Quasi profit organization*

Quasi profit organization adalah organisasi yang bertujuan untuk menyediakan atau menjual barang dan jasa untuk memperoleh laba dan mencapai tujuan lain sebagaimana yang dikehendaki oleh pemilik

3. *Quasi non profit organization*

Quasi non profit organization adalah organisasi yang menyediakan atau menjual barang dan jasa dengan maksud untuk melayani masyarakat dan memperoleh keuntungan.

4. *Pure non profit organization*

Pure non profit organization adalah organisasi yang menyediakan atau menjual barang dan jasa untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Husen dan Mowen (2010:52) Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Didalam tampilannya, anggaran selalu menyertakan da penerimaan dan pengeluaran yang terjadi dimasa lalu. Kebanyakan organisasi sector public melakukan pembedaan krusial antara tambahan modal dan penerimaan, serta tambahan pendapatan dan

pengeluaran. Dampaknya adalah pemisahan penyusunan anggaran tahunan dan anggaran modal tahunan.

Menurut Abdul dan Muhammad iqbal (2010:41) jenis anggaran sektor publik yaitu

1. Jenis anggaran sektor publik adalah :

- a. Anggaran Negara Daerah APBN/APBD (*Budget of state*)
- b. Rencana Kegiatan dan Anggaran perusahaan (RKAP) yaitu anggaran usaha setiap BUMN/BUMD Serta bahan Hukum publik atau gabungan publik swasta.
- c. Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP), yaitu anggaran usaha setiap BUMN/BUMD serta bahan hukum public atau gabungan Publik swasta.

2 Fungsi dari anggaran tersebut adalah :

- a. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja.
- b. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan dimasa mendatang.
- c. Anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan dan bawahan.
- d. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja.
- e. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam pencapaian visi organisasi.
- f. Anggaran merupakan instrumen politik.
- g. Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal/

4. Akuntansi Keuangan Daerah dan Akuntansi Pemerintah

Menurut Halim & Kusnufi (2010:48) Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten,kota atau provinsi) yang memerlukan. Pihak pihak eksternal dari entitas pemerintah daerah yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah),Badan Pengawas keuangan, investor, dan kreditor. Pada entitas pemerintah daerah laporan keuangan yang dihasilkan adalah sebagai berikut Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Neraca, Laporan Arus kas, Catatan atas Laporan keuangan

Menurut Hriadi (2010 : 50) Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan yang harus dihasilkan oleh pemerintah daerah selambat lambatnya tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut

1. Pelaporan Pelaksanaan Anggaran (budgetary reports)

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Laporan Perubahan saldo anggaran lebih (SAL)

2. Pelaporan Financial (financial reports)

- a. Neraca
- b. Laporan Operasional (LO)
- c. Laopran Arus kas
- d. Catatan atas laporan keuangan (CaLK)

a. Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Halim dan Iqbal(2009:23) Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang juga segala satuan baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Pengelolaan keuangan daerah adalah Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Menurut Surya Novi (2010:48) dokumen sumber yang digunakan dalam akuntansi belanja di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yaitu Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Membayar (SPM), Kuitansi Pembayaran dan bukti pengeluaran kas lainnya.

Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005 menjelaskan Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan.Maksud dari penyusunan standar akuntansi pemerintahan yaitu dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan

b. Belanja Daerah

Menurut Tanjung (2007 :38)“Belanja daerah merupakan pengeluaran daerah yang mengurangi ekuitas atau kekayaan bersih daerah dan tidak dapat diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah”.

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah di bagi menjadi dua jenis yaitu Belanja Langsung dan Belanja tidak langsung.

1. Belanja langsung adalah belanja yang di anggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan Belanja langsung di kelompokkan menjadi Belanja pegawai , Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal .
2. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan belanja tidak langsung di kelompokkan menjadi : Belanja Pegawai , Belanja Bunga , Belanja Subsidi , Belanja Hibah , Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil.

5. Akuntansi Transaksi Belanja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)

Menurut Rosdini (2008 :50) beberapa hal yang berkaitan dengan akuntansi transaksi belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Transaksi belanja di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dicatat oleh Petugas Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) Petugas Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja, dicatat sebagai pengurang belanja Akuntansi dilaksanakan berdasarkan asas bruto. Untuk transaksi belanja modal, pencatatan dilakukan secara *corollary*, yaitu dicatat dengan 2 (dua) jurnal

1. Transaksi belanja di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:
 - a. Pembayaran dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Uang Persediaan/Ganti Uang/ (SP2D UP/GU/TU)

b. Pembayarannya dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Langsung (SP2D LS).

Jurnal belanja LS dengan menggunakan dokumen sumber SP2D-LS bersangkutan tanpa menunggu Surat Peranggung Jawaban (SPJ) bendahara pengeluaran disahkan oleh BUD.

Suryanovi (2010) dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur akuntansi belanja di SKPD adalah: Surat Penyediaan Dana (SPD) ,Surat Perintah Membayar (SPM) ,Kwitansi Pembayaran dan bukti pengeluaran kas lainnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Menurut Tanjung (2012:160) Dalam PSAP 02 paragraf 31 dijelaskan bahwa belanja akan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah. Belanja yang dikeluarkan melalui SP2D-LS dapat diakui pada saat SP2D-LS tersebut diterbitkan atau dicairkan. Oleh karena itu PPK-SKPD dapat segera membuat jurnal belanja LS dengan menggunakan dokumen sumber SP2D-LS bersangkutan tanpa menunggu SPJ bendahara pengeluaran disahkan oleh BUD.

Menurut Tanjung (2012: 162) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 menjelaskan definisi belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/ daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Definisi lain, berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 menyebutkan belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Kewenangan SKPD dalam transaksi belanja meliputi belanja tidak

langsung, yaitu belanja pegawai kemudian belanja langsung yaitu: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja modal yang dimaksudkan adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi Belanja modal terdiri dari:

- a. Belanja Tanah
- b. Belanja Peralatan dan Mesin
- c. Belanja Gedung dan Bangunan
- d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
- e. Belanja Aset Tetap lainnya
- f. Belanja Aset lainnya.

Menurut Hariadi, dkk (2010:134) Sistem Akuntansi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Prosedur akuntansi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) meliputi:

1. Akuntansi Anggaran
2. Akuntansi Pendapatan
3. Akuntansi Belanja
4. Akuntansi Aset
5. Akuntansi Selain Kas.

Basis akuntansi yang di gunakan dalam laporan keuangan pemerintahan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan belanja dan pembiayaan dalam

laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca. Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara/daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum negara/daerah atau entitas pelaporan.

Sedangkan basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sistem pencatatan yang digunakan pemerintah pada saat ini adalah sistem ganda (*double entry system*) sesuai dengan PP No.24 tahun 2005. Menurut Permedagri No 13 tahun 2006, yang melaksanakan sistem akuntansi ini adalah PPK SKPD pada level SKPD dan BUD pada level SKPKD. Sistem akuntansi pemerintahan daerah menurut Permendagri No.13 tahun 2006 pasal 232 ayat (3) meliputi serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, dan peringkasan atas transaksi dan/ atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

B. Belanja Modal

1. Pengertian Belanja Modal.

Menurut Kasmir (2008 : 249) Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset

tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangunan di tambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Belanja modal meliputi: Belanja Modal tanah, Belanja Modal peralatan dan mesin, Belanja Modal gedung dan bangunan, Belanja Modal jalan irigasi dan jaringan , Belanja modal aset tetap lainnya, Belanja aset lainnya (aset tidak berwujud) .

2. Jenis-jenis Belanja Modal

Menurut Tunggal (2000 : 91) Belanja Modal terdiri dari yaitu:

a. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran atau biaya yang di gunakan untuk pengadaan atau pembelian pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah Pengeluaran baiaya yang di gunakan untuk pengadan atau penambahan atau penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin,serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 bulan,dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bnagunan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atauga penambahan

penggantian,dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan,pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan gedung yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

d. **Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan.**

Belanja Modal Jalan Irigasi dan jaringan adalah biaya yan digunakan untuk pengadaan penambahan atau penggantian peningkatan pembangunan atau pembuatan serta perawatan,dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan,pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Kriteria Belanja modal dan Prinsip Pengakuan Pengukuran Belanja Modal

Menurut salamah wahyuni (2008:23) “Kriteria Belanja Modal pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset pemerintah.pengeluarn tersebut melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah”.

Prinsip Pengakuan dan pengukuran Belanja modal Menurut Mardiasno (2009:45) “Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran,pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang di sahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan”.

1) Pencatatan Belanja Modal

Menurut Kieso weygant (2008:53) “Pencatatan Belanja Modal hanya di buat pencatatannya yang di gunakan *single entry* di buku anggaran yang nantinya akan menghasilakn Laporan Realisasi Anggaran.”

2) Pentingnya Penganggaran Belanja Modal

Menurut Tanjung (2007:56) “Keputusan penganggaran Belanja Modal aka berpengaruh pada jangka waktu yang lama sehingga perusahaan kehilangan flesibilitasnya,pengangaggaran Belanja Modal yang efektif dalam menaikkan ketepatan waktu dan kualitas pengeluaran modal sangatlah penting.”

3. Tahap –Tahap Belanja Modal

Menurut Tanjung (2007:43) “ Biaya Proyek harus di tentukan dan memperkirakan aliran yang di harapkan dari proyek termasuk niali akhir aktiva resiko aliran kas proyek harus di estimasi. Memakai distribusi probabilitas aliran kas,dengan mengetahui risiko proyek, manajemen harus menentukan biaya modal (*cost capital*) yang teapat untuk mendiskon alirab proyek.Dengan Menggunakan nilai waktu uang aliran kas masuk yang di harapkan di gunakan untuk memperkirakan nilai aktiva,terakhir nilai sekarang dari aliran kas yang di harapkan di bandingkan dengan biayanya

C. Penelitian Terdahulu

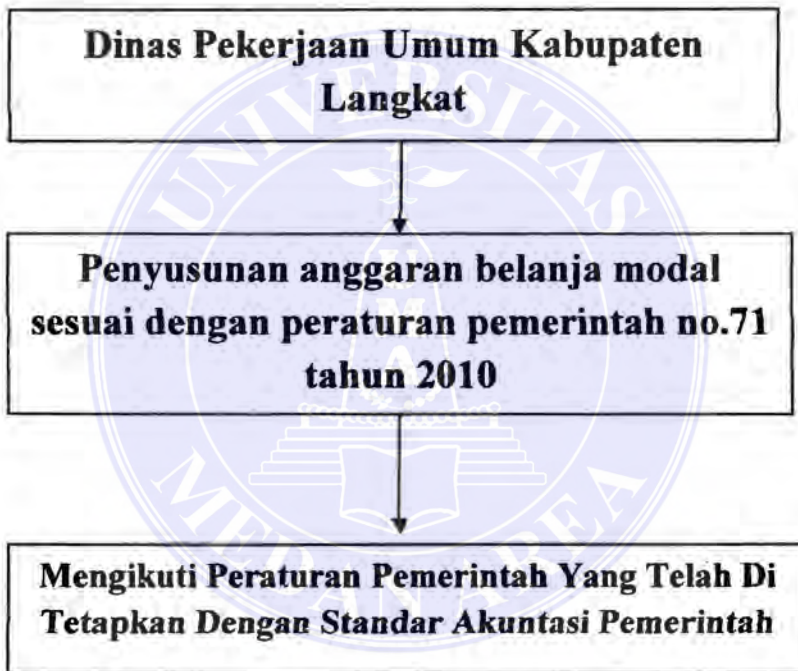
Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil penelitian
Syafitri (2012)	Analisis Implementasi Akuntansi belanja modal PP No. 71 tahun 2010 pada pekerjaan umum kota bitung .	Pekerjaan kabupaten bitung saat ini telah melaksanakan pengolaan keuangan untuk belanja modal sesuai dengan dengan peraturan pemerintah No 71 tahun 2010 tentang standart akuntansi pemerintah.
Siti Maryam Mohamad (2014)	Evaluasi Penerapan Akuntansi untuk Belanja Modal Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado.	Bahwa penerapan akuntansi untuk belanja modal pada dinas pekerjaan umum kota manado menambah tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang akuntansi agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang tepat untuk meningkatkan kinerja institusi.
Heri Adi prabowo (2010)	Evaluasi perlakuan akuntansi kapitalisasi belanja yang dapat diakui sebagai aset gedung dan bangunan dalam neraca daerah	Bahwa prosedur kapitalisasi belanja yang dapat diakui sebagai aset gedung dan bangunan pada pemerintah daerah pada prinsipnya tidak diatur secara spesifik dalam peraturan perundang – undang daerah.

D. Kerangka Konseptual

Menurut Sugiono (2010:60) kerangka Konseptual adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Gambar II.1
Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif. (Moh. Nazir 2008:54) metode deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat, yang berlokasi di Jl. T. Amir Hamzah No.3 Stabat Telp. (061) 8910616.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu Penelitian dimulai dari bulan Oktober 2015 samai dengan Januari 2016. Adapun rincian penelitian ini dapat dilihat pada table III.1 :

Table III.1
Rincian Waktu Penelitian

No	JenisKegiatan	2015-2016								
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni
1	PengajuanJudul	█								
2	Penyelesaian Proposal	█	█							
3	Bimbingan Proposal		█	█						
4	Seminar Proposal			█						
5	Pengumpulan Data				█	█				
6	Pengolahan Data					█	█			
7	Seminar Proposal							█	█	
8	SidangMejaHijau									█

B. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Menurut Sugiono (2010:80) populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan di teliti.

Populasi dalam penelitian ini adalah apakah akuntansi belanja modal dinas pekerjaan umum kabupaten langkatsudah sesuai dengan peraturan pemerintah no 71 tahun 2010

2. Sampel

Menurut Sugiono Sampel adalah Bagian dari populasi yang di ambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

lengkap yang di anggap bias mewakili populasi. Sampel berikut adalah apakan akuntansi untuk belanja modal pada dinas pekerjaan umum kabupaten langkat sesuai peraturan pemerintah no.71 tahun 2010.

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang di buat spesifik sesuai dengan criteria pengujian atau pengukuran, dibentuk dengan cara mencari indicator empiris konsep. Variabel merupakan segala sesuatu yang hendak di jadikan sebagai objek pengamatan di dalam sebuah penelitian. Jadi pengertian yang biasa di dapatkan dari definisi tersebut adalah bahwa di dalam sebuah penelitian ada sesuatu yang memang menjadi sasaran, misalnya variabel itu tadi. Sehingga variabel merupakan suatu fenomena yang menjadi perhatian di dalam penelitian yang di ukur atau di observasi.

- a. Belanja Modal adalah merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
- b. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Sektor Publik adalah “Suatu Proses pengumpulan pencatatan pengikhtisaran, penganalisaan dan pelaporan transaksi keuangan suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untupengambilan keputusan

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka-angka yang di peroleh dari sumber data.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang di peroleh dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat seperti struktur organisasi, sejarah singkat perusahaan, Visi dan Misi daftar laporan keuangan (2013-2014) di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat, mengenai Evaluasi Penerapan Akuntansi Belanja Modal Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teknik wawancara : dilakukan wawancara secara langsung dengan salah satu pihak di Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Langkat mengenai penerapan akuntansi untuk belanja modal berdasarkan peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010.
2. Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen, bukti – bukti atau catatan yang berhubungan dengan penerapan

akuntansi untuk belanja modal berdasarkan PP No.71 Tahun 2010.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data sehingga diperoleh gambaran yang cukup jelas tentang masalah yang dihadapi mengenai Penerapan Akuntansi untuk Belanja Modal berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 mengenai Standart Akuntansi Pemerintahan Daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim & Syam Kusufi, 2012, **Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi**, Salemba Empat : Jakarta.
- Amin, Widjaja Tunggal, Drs, 2009, **Akuntansi Sektor Publik Cetakan Pertama, Rineka Cipta**, Jakarta.
- Bastian, Indra, 2007, **“Pengaruh Sektor Publik”**, Salemba Empat, Jakarta.
- Halim Abdul dan Mohammad Kusnufi, 2010, **Akuntansi Keuangan daerah**, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Halim Abdul dan Muhammad Iqbal, 2007, **Pengelolaan Keuangan Daerah**, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Hariadi, dkk. 2010, **Pengelolaan Keuangan Daerah**, Salemba Empat, Jakarta.
- Harahap, Sofyan Syafri. **Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan**. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta 2009
- Heri Adi Prabowo, 2010, **Evaluasi Perlakuan Akuntansi Kapitalisasi Belanja yang dapat Diakui sebagai Aset Gedung dan Bangunan Dalam Neraca Daerah**, Jurnal Riset Akuntansi Indonesia.
- Kasmir, 2008, **Analisis Laporan Keuangan**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kieso, Weygandt, dan Warfield, 2008, **Akuntansi Intermediate, Edisi Kedua Belas**, Erlangga, Jakarta.
- Mahsun. 2006, **Akuntansi Sektor Publik**, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo, 2009, **Akuntansi sektor Publik Edisi Revisi**, Penerbit Salemba empat, Jakarta.
- Rosdini, 2008, **Pasar Modal : Teori, Masalah dan Kebijakan dalam praktek**, PT.Gramedia Pustaka, Bandung.
- Salamah Wahyuni, dkk, 2005, **Metodologi Penelitian Bisnis**, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Siti Maryam Mohamad, 2014, **Evaluasi Penerapan Akuntansi untuk Belanja Modal Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 pada Dinas Pekerjaan Umum pada Kabupaten Langkat**, Jurnal EMBA Vol. 2 No. 3 September 2014

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From repository.uma.ac.id/22/2/24